

**KEWENANGAN JAKSA DALAM PENGHENTIAN PERKARA TINDAK
PIDANA NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN Keadilan
RESTORATIF**



Disusun oleh:

FAHIM ATTAMIMI

NIM. 12123012

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
2025**

TESIS

**KEWENANGAN JAKSA DALAM PENGHENTIAN PERKARA TINDAK
PIDANA NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN Keadilan
RESTORATIF**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Narotama Surabaya**



Disusun oleh:

**PRO PATRIA
FAHIM ATTAMIMI**

NIM. 12123012

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA**

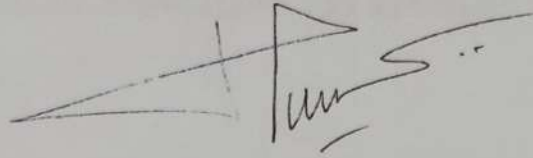
2025

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah Direvisi

Pada tanggal 11 Febuari 2025

Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. Tanudjaja, S.H., C.N., M.H.M.Kn.

Mengetahui,
PRO PATRIA
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Narotama




Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H

TESIS

PADA TANGGAL : 11 Februari 2025

TIM PENGUJI TESIS

Ketua :
Dr. MOH. SALEH S.H., M.H

Anggota :
Dr. TANUDJAJA S.H., C.N., M.H., M.Kn

Anggota :
Dr. SUWARDI S.H., M.Hum.



Three handwritten signatures are present on the right side of the page, each followed by a dotted line for a name or title.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Bersama ini saya menyatakan bahwa Tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 11 Febuari 2025

Yang membuat pernyataan



Fahim Attamimi
NIM : 12123012

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebab karena anugerah-Nya semata, akhirnya kami berhasil menuntaskan Tesis dengan judul “Kewenangan Jaksa dalam Penghentian Perkara Tindak Pidana Narkotika Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif”.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Tanudjaja, S.H., C.N., M.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing kami yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan ketulusan, sehingga tesis ini bisa dituntaskan dengan baik dan tepat waktu.

Terima kasih pula kepada Umi tercinta zainab mahdamy, Almarhum ayah adi abdul madjid attamimi, dan kakak saya Muchtar attamimi. Serta terima kasih pula kepada Istri Dina Baatwah dan ketiga anak saya, Ahmad, Nadien, dan Ahnaf yang telah memberikan dukungan secara moril, sehingga semangat saya tetap terjaga untuk menyelesaikan perjalanan studi ini.

Tak lupa kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Arasy Alimmudin, S.E., M.M.. selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya
2. Bapak Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya
3. Bapak Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H. selaku Kaprodi Magister Hukum Universitas Narotama Surabaya.

4. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya
5. Rekan-rekan mahasiswa Angkatan 54 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Narotama atas kebersamaannya, sehingga motivasi belajar yang tinggi dapat selalu kita jaga.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati saya menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, sehingga saya mengharapkan adanya saran dan kritik yang konstruktif demi menyempurnakan penelitian ini.



Ringkasan

Judul: Kewenangan Jaksa dalam Penghentian Perkara Tindak Pidana Narkotika dengan Pendekatan Keadilan Restoratif

Tesis ini mengkaji kewenangan kejaksaan dalam menghentikan perkara tindak pidana narkotika melalui pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini menekankan rehabilitasi medis dan sosial sebagai solusi yang lebih humanis dibandingkan sanksi pidana penjara. Hal ini relevan dengan prinsip negara hukum Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD 1945.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan doktrinal, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, untuk menganalisis regulasi dan doktrin yang relevan. Penulis menyoroti tantangan penerapan keadilan restoratif, seperti ketidakadilan dalam akses rehabilitasi, stigma sosial, dan lemahnya integritas aparat penegak hukum.

Kesimpulan tesis ini menegaskan bahwa sistem punitif berupa hukuman penjara belum efektif dalam menangani penyalahgunaan narkotika, sehingga diperlukan reorientasi kebijakan pidana menuju rehabilitasi. Tesis ini merekomendasikan penguatan kerangka hukum, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam mendukung rehabilitasi pengguna narkotika.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penghentian perkara tindak pidana narkoba, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam implementasinya. Pendekatan keadilan restoratif menempatkan rehabilitasi medis dan sosial sebagai alternatif yang lebih humanis dibandingkan hukuman penjara, sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Penelitian hukum normatif dan doktrinal ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis isu hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem punitif tidak hanya menyebabkan overkapasitas di lembaga pemasyarakatan, tetapi juga memunculkan stigma sosial yang menghambat pemulihan pelaku. Kejaksaan memiliki peran strategis sebagai dominus litis dalam menerapkan keadilan restoratif, namun efektivitasnya sangat bergantung pada integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan kerangka hukum, revisi UU Narkoba, peningkatan fasilitas rehabilitasi, dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk mendukung pemulihan pelaku penyalahgunaan narkoba. Kampanye publik juga diperlukan untuk mengurangi stigma terhadap pengguna narkoba, sehingga mereka dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Kata Kunci: *keadilan restoratif, kewenangan jaksa, tindak pidana narkoba, rehabilitasi, penegakan hukum.*

Abstract

The objective of this study is to analyze how the restorative justice approach is applied in ending drug crime cases and to identify challenges and solutions in its implementation. The restorative justice approach prioritizes medical and social rehabilitation as a more humane alternative to imprisonment, in line with the principles of a state of law that upholds human rights.

To analyze related legal issues, this normative and doctrinal legal research employs a legislative and conceptual approach. The study's findings indicate that the punitive system not only overburdens correctional facilities but also creates a social stigma that hinders the recovery of offenders. The Prosecutor's Office's strategic role as *dominus litis* in restorative justice implementation is largely determined by the integrity and professionalism of law enforcement officers.

This study suggests that the legal framework should be strengthened, the Narcotics Law should be revised, rehabilitation facilities should be improved, and collaboration between the government, society, and families should be established to help drug abusers recover. Public campaigns are necessary to decrease the stigma against drug users, allowing them to be accepted back into society.

Keywords: restorative justice, prosecutor's authority, narcotics crimes, rehabilitation, law enforcement.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING DAN KAPRODI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA PENGUJI.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Orisinalitas Penelitian	9
1.6 Tinjauan Pustaka	14
1.6.1 Toeri Keadilan.....	17
1.6.2 Toeri Kewenangan	19
1.6.3 Teori Penegakan Hukum.....	20
1.6.4 Teori Keadilan Restoratif.....	21
1.6.5 Teori Kepastian Hukum.....	23
1.6.6 Teori Kemanfaatan Hukum.....	24
1.7 Metode Penelitian.....	27
1.7.1 Tipe Penelitian	27
1.7.2 Pendekatan Penelitian	28
1.7.3 Bahan Hukum	29
1.7.4 Prosedur Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum	30
1.8 Sistematika Penulisan	31
BAB II PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF MELALUI REHABILITASI DALAM PENGHENTIAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA	33
2.1 Kewenangan Kejaksaan Dalam Penghentian Perkara...	33
2.1.1 Kejaksaan Republik Indonesia.....	33
2.1.2 Asas Oportunitas Kejaksaan	34
2.1.3 Keadilan Restoratif.....	35
2.2 Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Narkotika.....	40
2.2.1 Narkotika	41
2.2.2 Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika	42
2.2.3 Mekanisme Penghentian Penuntutan	43
2.3..... Kewenangan Diversi Oleh Penuntut Umum.....	44
BAB III UPAYA HUKUM PELAKU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG TIDAK MENDAPAT HAK REHABILITASI	56
3.1 Korban Penyalahgunaan Narkotika.....	57
3.2 Konsep Upaya Hukum	58

3.3 Upaya Hukum Pengaduan Internal Kejaksaan RI.....	60
3.4 Upaya Pengaduan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia	65
3.5 Upaya Hukum Praperadilan	69
3.6 Dasar Hukum bagi Keadilan dan Supremasi Hukum di Indonesia	74
BAB IV PENUTUP.....	78
4.1 Kesimpulan.....	78
4.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80

